

---

# HARAPAN BARU UNTUK KELUARGA TERTINGGAL

---

Upaya pembangunan bertahap dan berkelanjutan dimasa lalu telah berhasil menurunkan tingkat kemiskinan dari sekitar 60 persen pada awal tahun 1970-an menjadi sekitar 11 persen pada akhir tahun 1996. Pada tahun 1990-an penurunan jumlah dan prosentase penduduk miskin itu makin lambat. Pada awal krisis tahun 1997-1998 jumlah dan prosentase penduduk miskin itu meningkat kembali. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 1998 jumlah penduduk miskin sempat melonjak menjadi 49,5 juta atau 24 persen. Dengan intervensi yang gegap gempita oleh berbagai kalangan jumlah itu menurun kembali pada tahun 2000 menjadi 33,2 juta atau 16,07 persen.

Untuk menanggapi masalah itu, pada tanggal **16 Oktober 2001**, **Kantor Menko Kesra** mengadakan pertemuan untuk menindaklanjuti upaya yang telah dilakukan di masa lalu. Pertemuan itu dihadiri antara lain oleh para ahli, pelaksana dan pejabat teras dari berbagai Departemen, Instansi Pemerintah, Bank dan Pimpinan LSM, khususnya para pejabat atau aktifis yang selama ini ikut bersama-sama menangani upaya pengentasan kemiskinan. Pertemuan itu dipimpin langsung oleh Menko Kesra yang didampingi oleh Menko Ekuin dan para pejabat teras lainnya.

Dengan tekun pertemuan yang sangat memberi harapan baru bagi keluarga dan penduduk miskin itu mendengarkan paparan yang menarik dari para penanggung jawab dan pelaksana dari upaya pengentasan kemiskinan di masa lalu. Deputi Bidang Regional dan Sumberdaya Alam, Bappenas, **Dr. Dedi M. Masykur Riyadi**, memaparkan **program IDT** yang dimulai pada sekitar tahun 1993, serta **program 'rescue' Jaring Pengaman Sosial (JPS)** yang dilaksanakan pada akhir abad yang lalu. Penulis yang juga hadir dalam pertemuan itu, mencoba memaparkan secara kronologis falsafah dan upaya pemberdayaan keluarga yang dimulai dengan program KB, UPPKS, Takesra, Kukesra, Pundi dan Kukesra Mandiri.

Pada siang harinya mantan Menteri Koperasi dan UKM., Aktifis LSM yang gigih, **Dr. Adi Sasono**, menjelaskan secara gamblang upaya untuk menolong para petani dengan Kredit Usaha Tani atau KUT yang jumlahnya sangat kecil dibanding dengan kucuran dana kepada para Konglomerat untuk BLBI yang heboh itu. Akhirnya Direktur Utama BRI, **Drs. Lujito**, menutup acara **Pertemuan Round Table** sehari itu dengan paparan bagaimana Bank BRI menyalurkan dana kepada para petani yang ada di pedesaan di seluruh Indonesia.

Seperti kita ketahui program pembangunan yang dimulai secara sistematis sekitar awal tahun 1970-an pada awalnya mempunyai dampak langsung yang sangat menonjol terhadap penurunan jumlah penduduk dibawah garis kemiskinan. Pada akhir tahun 1980-an dampak itu makin melambat dan pada awal tahun 1990-an dampak itu hampir tidak kelihatan lagi. Melihat gelagat itu, pada tahun 1992 pemerintah

melaksanakan program khusus untuk mendukung secara langsung penduduk miskin. Tulisan ini adalah bagian pertama dari pertemuan yang menarik itu.

Upaya dukungan langsung itu mulai diwujudkan pada tahun 1993 melalui *program Inpres Desa Tertinggal (IDT)*, yang karena keterbatasan dana pemerintah, hanya dilakukan pada sekitar **22.000 desa** yang penduduknya sangat miskin. Menurut paparan Dr. Dedi M. Masykur Riyadi, program untuk setiap desa adalah berupa (i) bantuan modal usaha, (ii) bantuan pendampingan, dan (iii) bantuan Pembangunan Prasarana Pendukung Desa Tertinggal (P3DT). Fokus dari bantuan itu adalah untuk merangsang peningkatan pendapatan atau *'income generating'* dari penduduk miskin itu.

Untuk mendukung upaya peningkatan pendapatan bagi para penduduk miskin, kepada setiap desa diberikan bantuan dana pemberdayaan untuk bisa mulai melakukan usaha ekonomi produktif. Jumlah dana yang dijanjikan untuk setiap desa adalah Rp. 60 juta. Dana itu tidak diberikan secara kontan, tetapi dicicil pemberiannya selama tiga tahun dalam rangka pembelajaran. Dijanjikan bahwa dana yang dikucurkan kepada setiap desa tidak akan ditarik kembali oleh pemerintah, tetapi menjadi dana bergulir untuk dimanfaatkan kelompok penduduk miskin di setiap desa IDT yang bersangkutan.

Bantuan P3DT diberikan oleh pemerintah kepada setiap desa sebesar Rp. 120 juta untuk desa-desa di pulau Jawa, dan Rp. 130 juta untuk desa-desa di luar pulau Jawa. Bantuan itu untuk memperkuat kemampuan produksi dan pemasaran hasil usaha masyarakat serta memperkuat prasarana yang ada.

Pada tahapan berikutnya, untuk mempercepat upaya pengentasan kemiskinan yang sudah dimulai dengan program IDT tersebut, diberikan juga bantuan untuk memperkuat dukungan kecamatan dengan Program Pengembangan Kecamatan (PPK). Dukungan ini secara khusus diharapkan dapat memperkuat dukungan kelembagaan dan aparat birokrasi terhadap kelancaran usaha-usaha yang dilakukan oleh penduduk miskin.

Program IDT itu telah berhasil mengentaskan banyak penduduk miskin dengan menjadikannya sebagai pengusaha kecil, ikut bergerak dalam koperasi di desanya, atau bahkan menjadi pengusaha menengah yang berbobot.

Upaya pemberdayaan keluarga telah dimulai dengan *program KB* pada tahun 1970. Sejak awal, pasangan usia subur diajak ber-KB dan bersama-sama mengembangkan *Norma Keluarga Kecil yang Bahagia dan Sejahtera (NKKBS)*. Untuk menggalang solidaritas dan partisipasi aktif masyarakat dalam gerakan itu, para akseptor diajak bergabung dalam Kelompok Akseptor KB.

Dalam kelompoknya, masing-masing peserta KB diajak saling belajar dan mengembangkan kegiatan yang berguna. Setahap demi tahap dan sabar diharapkan mereka bisa mengembangkan cita-cita norma keluarga kecil yang bahagia dan sejahtera. Dengan menggunakan kontrasepsi secara setia, memelihara kesehatan ibu

dan anak-anaknya dengan baik, para peserta KB mulai bisa membangun keluarga kecil yang sehat.

Dengan hasil-hasil bersama yang makin membesarkan hati itu para peserta dalam setiap kelompoknya mulai melakukan kegiatan yang bersifat pendidikan dan ekonomi. Mereka melakukan kegiatan membina anak-anak balitanya, mencari beasiswa untuk anak-anaknya, serta belajar bersama dalam usaha ekonomi produktif agar bisa menjadi keluarga yang sejahtera. Mereka merubah kelompoknya menjadi **kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)**. Untuk memberi kesempatan keluarga-keluarga yang belum menjadi peserta KB ikut bergabung, kelompok-kelompok yang ada itu dikembangkan menjadi **kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS)** yang keanggotaannya bersifat terbuka.

Dalam kelompok-kelompok ini gagasan pemberdayaan ekonomi keluarga yang secara khusus ditujukan kepada keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I, terutama karena alasan ekonomi, makin menggebu. Pada saat program IDT diluncurkan untuk **22.000 desa**, diputuskan agar untuk desa yang tidak tercakup, yaitu desa non IDT, sekitar **43.000 desa**, intensifikasi program pemberdayaan keluarga harus bisa menjadi gantinya atau menjadi suplemennya.

Karena itu, mulai tanggal **2 Oktober 1995** keluarga-keluarga yang bergabung dalam kelompok-kelompok UPPKS diajak belajar menabung. Upaya ini mengalami kesukaran karena keluarga miskin tidak mempunyai semangat dan modal untuk mulai menabung. Pada tanggal **15 Januari 1996** didirikan **Yayasan Dana Sejahtera Mandiri (Damandiri)** untuk memberi dukungan terhadap upaya pemberdayaan keluarga yang sangat mulia itu. Mulai saat pendiriannya Yayasan memberi bantuan kepada setiap keluarga miskin modal awal sebesar **Rp. 2.000,-** untuk menabung dalam **Tabungan Keluarga Sejahtera atau Takesra** yang dikelola **Bank BNI**.

Dengan tabungan Takesra sebesar Rp. 2.000,-, setiap keluarga dapat meminjam modal usaha pada Bank BNI berupa "**Kredit Usaha Keluarga Sejahtera**" atau "**Kukesra**" sebesar sepuluh kali tabungannya. Dari pinjaman sebesar Rp. 20.000,- sebesar 10 persen ditabung kembali, sehingga tabungannya menjadi Rp. 4.000,-. Kalau pinjaman sudah lunas, maka yang bersangkutan dapat meminjam 10 kali tabungannya. Pinjaman baru menjadi Rp. 40.000,-. Selanjutnya 10 persen ditabung lagi, dan menjadi dasar untuk pinjaman berikutnya. Begitu seterusnya sampai putaran yang kelima dengan pinjaman sebesar Rp. 320.000,- untuk setiap anggota.

Kegiatan yang sudah berlangsung selama lebih dari lima tahun itu berjalan dengan relatif sukses. Pada bulan **Juli 2001**, menurut laporan Bank BNI, jumlah penabung telah mencapai sekitar **13.022.122 keluarga** dengan jumlah tabungan Takesra sebesar **Rp. 241.761.154.809,-** atau **Rp. 241 milyar lebih**. Jumlah keluarga pebabung yang memanfaatkan kredit **Kukesra** adalah **10.524.538** atau **10,5 juta keluarga** dengan jumlah kredit seluruhnya berjumlah **Rp. 1.651.975.180.000,-** atau **Rp. 1,6 triliun lebih**.

Dari sekitar **10,5 juta keluarga** yang menikmati kredit **Kukesra** itu banyak juga yang telah berhasil dengan baik. Mereka membutuhkan jumlah dana yang lebih besar. Oleh karena itu mulai tahun 1997-1998 telah dikembangkan program baru yang disebut **Kredit Pengembangan Kemitraan Usaha (KPKU)** dan **Kredit Pengembangan Tehnologi Tepat Guna untuk Pengentasan Kemiskinan (KPTTG)-Taskin** yang bisa memberikan kredit dengan jumlah dana yang lebih besar. KPKU dan KPTTG-Taskin ini mendapat dukungan dana dari **Yayasan Dakab** dan **Yayasan Damandiri**.

Program yang kedua itu mulai menggunakan mekanisme otonomi daerah, yaitu dengan dibentuknya **Tim Terpadu** di daerah, yang tugasnya memutuskan kelayakan para nasabah atau kelompoknya. Penyaluran dana kepada para pimpinan kelompok dilakukan oleh **Bank Pembangunan Daerah (BPD)** sesuai dengan persyarikatan yang disepakati.

Pengalaman dengan KPTTG-Taskin itu diperkaya dengan percobaan pembinaan yang dilakukan oleh aparat atau lembaga swasta yang ada di daerah atau aparat bank pelaksana, yaitu bersama **Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Nusamba** dan **BPR Artha Huda Abadi**. Kedua BPR tersebut mendampingi dan membina nasabahnya disertai penyaluran **kredit dengan sistem jemput bola** dengan **bunga pasar**. Bentuk dukungan pembinaan dan pemberdayaan yang baru ini dinamakan **Pembinaan Usaha Keluarga Sejahtera Mandiri** atau **Pusaka Mandiri** atau **Pundi**. Atas dasar pengalaman itu maka **Program Pundi**, sesuai dengan arahan **Ibu Presiden RI**, telah dikembangkan ke **Kawasan Timur Indonesia (KTI)** melalui Bank-bank Pembangunan Daerah (BPD) dan Bank Bukopin.

Pengalaman yang berhasil dari dua BPR, BPD-BPD dan Bukopin, mengajarkan kepada kita bahwa **penyaluran bantuan** atau **kredit** untuk **keluarga miskin harus dilakukan** oleh **lembaga keuangan pedesaan** dan **dapat diberikan dengan bunga pasar** biasa. Agunan untuk bantuan kredit adalah **pengakuan atas kelayakan usaha**, atau **didukung oleh Pemerintah Daerah**, atau oleh **Lembaga Lain** yang peduli terhadap pemberdayaan keluarga dan penduduk miskin. Setiap kelompok keluarga miskin memerlukan bantuan pembinaan dan pendampingan yang bisa dilakukan oleh aparat daerah, aparat bank atau petugas yang ditunjuk langsung untuk itu. Agar ada hubungan yang erat dengan dukungan kredit, para pembina atau **pendamping harus berorientasi bisnis** dan bertanggung jawab kepada masing-masing Bank Penyalur. Untuk merangsang partisipasi nasabah, harus diberikan insentif yang menarik dan sekaligus mendidik serta memperbaiki lingkungan yang ada. Pengalaman mengajarkan bahwa usaha ini harus **berkelanjutan** dan **konsisten**. (Prof. Dr. Haryono Suyono, Pengamat Masalah Sosial Kemasyarakatan).(A1/B2/D1)

## BERTAHAP MEMBANGUN KELUARGA

Sejak kemerdekaan, bangsa Indonesia sangat sadar bahwa keadaan sumber daya manusianya sangat lemah. Oleh karena itu dalam setiap langkah pembangunan kita berusaha keras untuk memberikan perhatian yang sangat tinggi terhadap upaya pembangunan sumber daya manusia tersebut.

Dalam rangkaian pembangunan yang berkelanjutan pada tahun 1970-an, upaya itu dilakukan secara sistematis dalam tahapan-tahapan yang teratur untuk mengembangkan sumber daya manusia sebagai pemrakarsa, penggerak dan pembina pembangunan. Karena luasnya cakupan pembangunan tersebut, pemerintah beranggapan bahwa upaya itu harus dilakukan oleh pemerintah bersama masyarakat secara terpadu. Untuk itu pemerintah berupaya dengan sungguh-sungguh melengkapi upaya pengembangan sumber daya manusia itu dengan mempersiapkan dan membangun lembaga-lembaga pemerintah dan institusi masyarakat secara luas.

Pengembangan kelembagaan masyarakat itu dilakukan dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat dan keluarga sebagai awal dari upaya menumbuhkan institusi masyarakat yang kuat, profesional dan tersebar luas dikalangan masyarakat sendiri. Untuk mempercepat proses pemberdayaan itu dilakukan berbagai latihan yang dipadukan dengan upaya pemberdayaan sumber daya manusianya. Dalam kegiatan tersebut ada kalanya institusi masyarakat itu langsung dibentuk dengan menunjuk para pemimpinnya yang "dipinjam" dari aparat birokrasi.

Peminjaman tersebut ada kalanya disadari, tetapi ada kalanya juga "kebablasan" dengan pengertian bahwa lembaga masyarakat itu ditangkap pengertiannya harus dipimpin oleh aparat yang berasal dari birokrasi "*supaya dapat dikendalikan*".

Dalam konteks *pemberdayaan keluarga* di *Indonesia* sejak tahun 1960-an, lebih khusus lagi dalam konteks kesejahteraan reproduksi dan KB kesehatan, pendidikan, dan kemampuan ekonomi, dapat dikatakan terbagi menjadi 5 (lima) tahapan, sebagai berikut.

***Pertama, tahun 1945-1970:***

Pengembangan prakarsa, tekad komitmen dan awal dari gagasan pengembangan sdm

***Kedua, tahun 1970-an:***  
lembaga

Pengembangan program dan pelaksana seluruh Indonesia

***Ketiga, tahun 1980-an:***

Pengembangan dasar-dasar hukum untuk melakukan keterpaduan dukungan pada institusi keluarga dan masyarakat secara menyeluruh dan terpadu

***Keempat, tahun 1990-an:***

Pengembangan dukungan terpadu. makin bersifat holistik serta pengembangan institusi yang makin mandiri

***Kelima, tahun 2000-an***  
makin

Pengembangan dukungan yang teknis bersifat ekonomi dan religius untuk menghadapi modernisasi dan globalisasi.

Secara terperinci dalam setiap tahap itu bisa dihasilkan hal-hal antara lain sebagai berikut:

***Tahap pertama, antara tahun 1945-1970.*** Tahapan yang dimulai sejak Indonesia menyatakan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945 merupakan awal dari segala-galanya. Kita menyadari bahwa pembangunan memerlukan sumber daya manusia yang tangguh. Tetapi karena penjajahan ternyata jumlah dan kualitas SDM yang kita miliki tidak memadai. Secara politis dikembangkan komitmen untuk mengembangkan SDM yang disertai dengan pengembangan sekolah-sekolah dan berbagai universitas.

Pada ***tahap kedua, tahun 1970-an,*** gagasan-gagasan awal itu diterjemahkan lebih lanjut dalam komitmen dan program untuk. bidang-bidang kesehatan. KB. pendidikan. dan perhatian yang luas terhadap masalah-masalah sosial kemasyarakatan. Program-program itu diterjemahkan dalam tahapan-tahapan pembangunan yang berkelanjutan.

Pada saat itu muncul upaya untuk mengikutsertakan masyarakat secara luas dalam berbagai upaya dalam bidang sosial kemasyarakatan. Salah satu program yang kemudian menjadi sangat penting adalah program KB yang pada perkembangan berikutnya telah berhasil menjadi ***suatu gerakan pemberdayaan keluarga secara terpadu dan luas.***

Pada tahap tersebut hampir semua Departemen dan Instansi dalam lingkunganpemerintah mulai mengembangkan komitmen dan program yang intinya adalah memberikan dukungan agar sebanyak-banyaknya keluarga ikut terjun dalam upaya program KB dan yang terkait. Dengan cara demikian maka pengembangan sumber daya manusia mulai ditangani secara sistematis yaitu bahwa penduduk harus sehat. mempunyai kesempatan untuk belajar dan menikmati kesempatan kerja yang mulai terbuka.

Upaya program KB yang dikaitkan dengan berbagai upaya lainnya itu dikembangkan untuk menolong para ibu dan keluarganya. yang pada umumnya miskin dan buta huruf, untuk. meningkatkan dan memelihara kesehatan reproduksi, menyekolahkan anak-anaknya. dan bekerja keras mempergunakan kesempatan pembangunan yang mulai terbuka.

Pada akhir tahapan ini ternyata upaya KB. kesehatan dan pendidikan. dengan berbagai

Program Inpresnya. ternyata mendapat perhatian yang sangat luas dari masyarakat. Banyak sekali keluarga mengikuti berbagai program yang selama tahun 1970-an dicoba diusahakan secara terpadu tersebut. Bahkan dirasakan adanya keperluan untuk memberikan dukungan "ketetapan hukum" yang lebih kuat agar keterpaduan dan dukungan pemerintah itu makin mengarah pada penciptaan dan pembinaan SDM yang handal dan mampu mengangkat harkat dan martabat bangsa.

Pada *tahapan 1980-an* pemerintah bersama masyarakat mulai mengisi lembaga-lembaga dan institusi masyarakat pada tahun 1970-an itu dengan program-program yang relatif gegap gempita. Masyarakat sendiri menyambut program-program dan kegiatan itu dengan gerakan terpadu melalui lembaga-lembaga pedesaan dengan antusiasme yang sangat tinggi.

Gerakan terpadu itu menghasilkan sukses yang menggembirakan. Kelembagaan yang ada dalam masyarakat sendiri makin luas. Masyarakat mulai melahirkan program-program yang sifatnya makin mandiri dan dibiayai oleh masyarakat sendiri. Bahkan mulai timbul unit-unit swasta yang memberikan pelayanan secara komersial mandiri. Aktivitas yang semula hanya bergerak dalam bidang kesehatan dan pendidikan mulai meluas ke bidang KB. Pelayanan dalam jalur komersial itu disertai makin tingginya kesadaran dan peningkatan mutu pelayanannya.

Pada *akhir tahun 1980-an, 8 Juni 1989*, Indonesia memperoleh penghargaan dunia dalam *bidang Kependudukan* dengan diberikannya *World Population Award* kepada Presiden RI oleh Sekjen PBB. serta beberapa penghargaan lain dari berbagai lembaga swasta.

*Tahapan tahun 1990-an* diawali dengan kesadaran yang sangat tinggi dalam bidang KB. kesehatan dan pendidikan. termasuk wajib belajar yang semula hanya pada tingkat SD dikembangkan lebih lanjut sampai ke tingkat SLTP.

Pada awal atau pertengahan tahun sembilan puluhan itu dapat disepakati *UUD tentang Kependudukan dan Keluarga Sejahtera* serta *UU tentang Kesehatan*. kedua UUD' itu diikuti segera dengan beberapa *Peraturan Pemerintah* yang mengatur kegiatan operasional bidang-bidang yang relevan.

Pada tahun itu pula Indonesia memainkan peran yang sangat penting dalam kaneh dunia. baik dalam bidang kesehatan maupun dalam bidang KB. Namun mulai dirasakan bahwa para peserta yang sudah bertahun-tahun ber-KB belum secara penuh merasakan keadaan yang lebih baik. Tingkat kemiskinan yang ditahun 1970-an dan di tahun 1980-an menurun dengan cukup signifikan makin menunjukkan tingkat penurunan yang "*stalling*" atau *melamban*. Pemerintah kemudian mulai menggagas *upaya khusus untuk- mengentaskan kemiskinan* itu berupa dukungan kepada komunitas yang mempunyai daerah-daerah atau kelompok. masyarakat yang berhasil dalam berbagai program pembangunan.

Gagasan penghargaan kepada komunitas itu kemudian makin muncul setelah disyahnkannya UUD tentang kependudukan dan keluarga sejahtera yang menunjukkan

diperlukannya pemberdayaan seluruh *fungsi keluarga* yang secara jelas disebutkan dalam PP yang dikeluarkan atas dasar UU nomor 10 tahun 1994.

Pada tahun 1990-an mulai muncul gagasan pemberdayaan ekonomi keluarga yang sepantasnya harus dilanjutkan sekarang dengan lebih gegap gempita. Tahapan tahun 2000-an menempatkan keluarga dalam dunia yang sangat menantang, yaitu menghadapi era globalisasi yang modern. Negara-negara di dunia hampir tidak mempunyai batas, sehingga setiap keluarga harus memperkuat dirinya dan sekaligus mendapat dukungan dari lembaga-lembaga formal dan informal yang ada di sekitarnya, seperti pesantren, kumpulan para sesepuh, dan lembaga ekonomi keuangan yang dekat dengan lingkungannya untuk bisa bertahan.

Keluarga akan menghadapi tantangan ekonomi yang sangat berat, rumit serta Maha, sehingga suami isteri harus dua-duanya mengambil peran yang sangat aktif dalam ekonomi mikro agar keluarganya tetap dapat bertahan dari tantangan modernisasi dan globalisasi itu. Pada saat yang bersamaan keluarga menghadapi tantangan benturan tata nilai antar daerah dan antar negara yang bisa rumit, sehingga diperlukan dukungan lembaga-lembaga keagamaan, lembaga adat atau dukungan para sesepuh kalau ingin tetap bisa bertahan dalam tata nilai asli yang dimodernisasir dari suku dan bangsanya.

Karena tantangan yang bertubi-tubi itu bisa muncul kebanggaan dan kerinduan akan tata nilai tradisional yang memberikan kedamaian dan ketenangan dalam setiap diri individu atau keluarganya. Tantangan keluarga besar yang sedang berubah menjadi keluarga *batih* dan mulai tumbuh subur di tahun 1990-an akan makin menonjol, tetapi dipihak lain keluarga *batih* yang mendapat tantangan global itu menimbulkan kerinduan karena mulai akan dirasakan adanya kesunyian pada keluarga *batih* yang bergolak dalam riuh rendahnya benturan peradaban antar bangsa yang kadang-kadang sukar dicerna sendiri.

Karena itu hari-hari besar atau hari libur mulai menjadi forum untuk mengenang kembali nostalgia itu. Sehingga keluarga secara tidak sadar berkumpul kembali dengan kerabat sesamanya untuk mengenang masa-masa indah sistem kekerabatan *extended famili*. Kerinduan awal yang semula bersifat formal akan menjadi suatu kerinduan budaya yang bisa saja menghasilkan tontonan-tontonan menarik karena muncul gagasan-gagasan modernisasi dari berbagai sistem yang tertuang dalam segi praktis dan mudah diikuti.

Perbenturan yang awalnya menimbulkan efek tontonan akan makin lama makin mangabur dan muncul sebagai kultur baru yang dapat diterima secara wajar-wajar saja. Disisi lain perbenturan itu bisa juga berubah menjadi benturan yang mempunyai efek konflik fisik, dan mental. Akhirnya dalam tahapan berikutnya benturan itu akan meleleh dan membaur menuju keseimbangan baru menjadi suatu kesatuan yang mungkin pada awalnya tidak harmoni, penuh dengan kecurigaan, tetapi akhirnya akan menyatu menjadi suatu keseimbangan budaya baru dengan kelembagaan modern dan maju.

Efek-efek awal itu akan bisa terasa berat dan keluarga yang kokoh akan sangat berperan untuk membangun jati diri dan kekuatan daya tahan yang ampuh. Semoga tahapan-tahapan yang berjalan dengan cepat itu dapat dihadapi oleh keluarga Indonesia dengan aman dan baik. (*Prof. Dr. Haryono .Suyono, Pengamat Masalah .Sosial kemasyarakatan]-kel uarga- Tahapan-1 6200*)<sup>2</sup>.

## MENUJU KB MANDIRI

Saat membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) program KB di Istana Negara, Jakarta, 30 Januari 2002, Presiden Republik Indonesia, *Ibu Megawati Soekarnoputri* didampingi Menteri Kesehatan, Menteri Agama dan Kepala BKKBN, menyampaikan pidato pembekalan dengan gaya keibuan yang meyakinkan, beliau menyampaikan lima hal pokok yang perlu mendapat perhatian dan tindak lanjut seluruh peserta Rakernas.

*Pertama*, beliau menyampaikan pengakuan simpatik yang sekaligus dapat dianggap sebagai penghargaan kepada para pejuang dan pekerja KB di seluruh Indonesia atas keberhasilan menurunkan pertumbuhan penduduk dari *angka diatas 2 persen* pada *tahun 1970-an* menjadi sekitar *1,4 persen* menurut hasil Sensus Penduduk tahun 2000. Walaupun, secara kelakar, beliau merasa risau menghadapi banyaknya anak-anak yang selalu dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Namun lebih dari itu, beliau menyatakan bahwa, program KB Nasional, bagaimanapun penting artinya bagi pelaksanaan dan keberhasilan program-program pembangunan. Program itu merupakan bagian penting dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang merupakan titik sentral pembangunan.

Pengakuan, atau katakanlah *“pemberian penghargaan”*, itu sangat penting karena selama beberapa tahun terakhir ini lembaga dan para sukarelawan gerakan KB agak terombang-ambing, dan tidak bisa mengerti seakan diperlakukan sebagai *habis manis sepah dibuang*. Pada masa keadaan pertumbuhan dan kualitas penduduk sangat rawan, seluruh kekuatan pembangunan diajak bekerja keras meyakinkan semua pihak bahwa pembangunan keluarga dan penduduk itu sangat perlu karena akan menentukan masa depan bangsa.

Para pemimpin, formal dan pemimpin masyarakat luas, para petugas, para ulama dari segala agama, para pemimpin wanita, tua muda dan bahkan generasi muda, tidak terkecuali para cendekiawan, dengan tidak kenal lelah diajak berjuang menanggung malu dan caci maki memperjuangkan visi yang semula nampak sebagai menentang arus, tetapi memang diyakini benar dan berguna untuk kejayaan masa depan bangsa.

Penghargaan demi penghargaan, baik datang dari dalam negeri maupun luar negeri diberikan kepada bangsa ini. Penghargaan itu bukan saja dalam bentuk *wacana*, atau *trophy*, tetapi dengan penuh kesungguhan negara-negara sahabat mengirimkan utusannya untuk belajar ke negeri kita. Tidak kurang dari Presiden, Perdana Menteri, Menteri, pejabat senior, bahkan petugas lapangan berdatangan menyisihkan waktu dan terang-terangan belajar mendalami cara-cara pemerintah bekerja sama dengan masyarakat membangun kebersamaan membantu keluarga memberdayakan dirinya. Mereka juga kagum dan dengan penuh ketekunan meniru bagaimana dalam keadaan miskin bangsa kita bisa membangun jaringan pelayanan informasi dan medis yang sangat profesional. Tidak kurang dari 35 – 40 juta pasangan usia subur yang ada di seluruh pelosok Indonesia mendapat informasi tentang KB dan reproduksi sehat yang

biasanya sangat “*saru*” dan “*tabu*”, bisa disampaikan kepada masyarakat dengan senyum dan lapang dada.

Hanya beberapa ribu dokter dan tidak lebih dari 8.000 bidan, pada saat-saat awal program KB, dengan tidak kenal lelah harus bekerja keras melayani calon peserta KB yang biasanya sangat awam tentang masalah yang sesungguhnya sangat rumit itu. Tidak kurang dari 35 – 40 juta pasangan subur mendapat pelayanan medis, di klinik, bahkan di desa-desa dengan fasilitas minim, dilayani dengan cucuran keringat, tidak kenal lelah dan sangat profesional sehingga menghasilkan kebahagiaan dan kesejahteraan dengan hampir tidak ada korban yang berarti.

***Kedua***, beliau mengingatkan bahwa salah satu pelajaran yang sangat berharga selama kita menggeluti masalah kependudukan dan KB adalah bahwa jumlah sumber daya manusia yang besar merupakan kekuatan pembangunan ternyata hanya mengandung kebenaran bila kondisi tersebut disertai faktor kualitas dan penyebaran yang merata. Beliau menambahkan bahwa tanpa kondisi itu manusia tidak bisa tampil dalam peran dan fungsinya sebagai sumber daya, malah bisa menjadi beban.

Beliau menganjurkan, biarpun pengertian ini mulai disadari masyarakat, tetapi kita perlu terus menanamkan pengertian itu kepada masyarakat bahwa selaku pelaku pembangunan, sebenarnya masyarakat secara langsung menikmati hasil-hasil pembangunan.

Dibagian lain dari pidatonya beliau meminta kita semua untuk waspada bahwa dewasa ini berkembang nilai-nilai baru dalam masyarakat. Pengaruh gaya hidup, peningkatan kesejahteraan dan arus komunikasi yang deras bisa saja mempengaruhi keyakinan kita terhadap cita-cita Norma Keluarga Kecil Yang Bahagia dan Sejahtera. Biarpun nilai-nilai baru ini berkembang dalam masyarakat yang terbatas, namun beliau mengingatkan untuk diwaspadai. Perkembangan baru itu bisa saja mendorong lahirnya cita baru, yaitu keluarga besar tetapi sejahtera.

***Ketiga***, sebagai pelaku, masyarakat sangat berkepentingan untuk terwujudnya keluarga yang berkualitas. Dengan cara pikir tersebut Ibu Megawati Soekarnoputri menekankan bahwa Pemerintah tidak harus menggelar program KB secara besar-besaran, tetapi masyarakat harus ***lebih banyak mengambil prakarsa*** untuk melanjutkan pengembangan Program KB itu. Dengan pernyataan ini beliau mempersilahkan masyarakat luas untuk mengambil prakarsa yang lebih besar untuk melanjutkan penanganan program KB-nya sendiri.

Ada beberapa alasan kenapa beliau memberikan kesempatan kepada masyarakat luas untuk mengambil prakarsa yang lebih besar. Gara-gara krisis keuangan yang berlanjut menjadi krisis ekonomi yang berkepanjangan, krisis multidimensi yang belum selesai sekarang ini, hampir pasti keadaan dunia, maupun keadaan kita, belum bisa bertambah baik. Di negara-negara besar masih terjadi goncangan-goncangan yang sangat mengganggu. Amerika, Jepang dan banyak negara besar yang selama ini menjadi donor membantu aktivitas KB di Indonesia mempunyai banyak masalah di negaranya sendiri. Keadaan itu kurang menguntungkan, lebih-lebih lagi kita sendiri mempunyai kesulitan ekonomi yang sangat besar dan belum dapat kita selesaikan.

Kita bersyukur bahwa pembangunan jaringan pelayanan KB selama ini selalu kita kaitkan dengan pelayanan dan rujukan melalui klinik-klinik yang dikelola oleh Departemen Kesehatan. Pelayanan itu tidak pernah di pindah tangankan kepada BKKBN atau menjadi lembaga BKKBN seperti terjadi di beberapa negara tetangga, biarpun kalau mau, kemampuan untuk itu bisa dilakukan dimasa lalu. Dengan demikian, para peserta KB yang berasal dari keluarga kurang mampu, keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I, atau keluarga yang kurang beruntung, masih bisa ditolong pemerintah melalui pelayanan khusus, bahkan kalau perlu dibebaskan dari pembayaran apapun. Pelayanan itu tetap bisa dilakukan melalui pelayanan kesehatan terpadu di klinik, rumah sakit atau pelayanan kesehatan khusus lain yang tersedia untuk itu. Bahkan, kalau perlu peserta-peserta KB seperti itu bisa dijamin dengan pelayanan *“super khusus”* seperti pelayanan yang didukung dengan dana kompensasi BBM atau program lain seperti itu.

Dalam program yang makin mandiri, BKKBN dapat bertindak sebagai fasilitator dan advokator yang mendorong dikembangkannya pelayanan informasi dan medis yang terhormat, mudah di akses, profesional, dan *“merangsang”* sehingga para peserta KB yang mampu tidak merasa disisihkan atau *“boleh lagi tidak ber-KB”* mengikuti pola lama reproduksi kurang sehat. Dengan dukungan komunikasi yang sejuk, para peserta akan tidak merasakan *“udanya kenaikan harga”*, seperti umumnya keadaan yang terjadi sekarang, tetapi justru *“mendapat kehormatan”* bisa memilih secara demokratis pelayanan untuk dirinya sendiri melalui *program KB Mandiri* yang bermutu.

*Keempat*, Ibu Megawati Soekarnoputri juga menegaskan bahwa lingkup pengertian keberhasilan program KB beberapa waktu terakhir ini mengalami pemekaran. Namun beliau mengingatkan bahwa kondisi dan kemampuan pemerintah berubah. Dalam kondisi yang lebih mampu di masa lalu dimungkinkan disambungkannya program KB dengan program-program lain seperti mengkaitkan program KB dengan berbagai skema pengentasan kemiskinan, program peningkatan ekonomi rumah tangga, pendidikan dan lain-lain. Namun, dengan pemahaman kondisi, beliau merasa bijaksana kalau segera dibangun *kiat baru* dalam penyelenggaraan *program KB (dalam arti luas)* seperti itu dengan hasil yang harus sama efektifnya.

Kita bersyukur bahwa anjuran mencari dan membangun kiat baru itu beliau lontarkan bersamaan dengan dorongan semangat dan pemberian kesempatan yang makin besar kepada swasta dan LSM untuk membangun program yang mandiri. Kita mengetahui bahwa pembangunan keluarga sejahtera dimasa lalu telah dikaitkan dengan berbagai upaya pemberdayaan keluarga sejahtera, termasuk langkah-langkah konkrit membantu keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I belajar menabung dengan Tabungan Takesra dan belajar berusaha secara bertahap dalam program Kukesra. Disamping itu pemerintah dengan gencar juga membantu keluarga kurang mampu dengan skim pengentasan kemiskinan lain untuk makin mandiri. Kita ingat betapa pemerintah mendorong kemandirian melalui pelaksanaan program IDT pada tahun 1993/1994. Kita juga mengetahui betapa berbagai Departemen dan Instansi ikut terjun langsung di masa sebelumnya.

Memang tidak semua usaha itu berhasil menciptakan jaringan yang mandiri. Tetapi sesungguhnya tidak sedikit kelompok-kelompok yang siap untuk mandiri. Salah satu syaratnya adalah bahwa pemerintah harus mengambil sikap yang terus memihak keluarga kurang mampu di segala jaringannya. Tidak boleh lagi pemerintah menjadikan keluarga kurang mampu sebagai *'proyeknya'*. Secara konsekuen pemerintah harus mendukung langkah *"reinventing Government"* atau *"mewirauahakan birokrasi"* yang mengayomi, mendukung, memberdayakan dan memperkenalkan kelompok-kelompok yang berhasil kepada pelayanan jaringan swasta yang ada. Dilain pihak meneruskan bantuan pemberdayaan untuk kelompok-kelompok yang masih memerlukan bantuan penuh.

Sebagian besar keluarga miskin, keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I, terutama yang telah menjadi peserta KB telah belajar menabung dengan *Takesra* dan belajar usaha dengan bantuan dana *Kukesra* melalui *BKKBN, Yayasan Damandiri, PT Bank BNI dan PT Pos Indonesia* serta jajarannya. Sesuai dengan kebijaksanaan yang digariskan oleh Ibu Presiden, kelompok yang berhasil dan lulus dari program ini harus segera diantarkan untuk bergabung dalam Skim-skim lanjutan seperti *Kukesra Mandiri, Pundi, Pundi Kencana, Warung JK, Warung Sudara*, koperasi atau jaringan swasta mandiri lainnya. Hantaran bagi yang telah siap mandiri itu *harus dilakukan dengan dukungan yang penuh legawa dan berlanjut.*

*Kelima*, untuk gagasan-gagasan itu Ibu Megawati Soekarnoputri memberikan kata kuncinya. Dalam melaksanakan tugas-tugas ini BKKBN harus *melakukan koordinasi*. Dalam pidato singkat itu beliau ulangi kata kunci tersebut dengan tegas, *koordinasi*. Koordinasi itu harus dimulai sejak tingkat perencanaan, persiapan, pelaksanaan, bahkan hingga tingkat pengendalian dan evaluasinya.

Selanjutnya Ibu Megawati Soekarnoputri *"memukul gong"* limakali. Dengan simbol pukulan itu beliau mengajak semua peserta untuk melangkah tegar dengan lima pedoman pokok tersebut. Semoga dengan peta hasil pendataan 2001, BKKBN bisa mengerahkan bantuan untuk para peserta KB di seluruh Indonesia yang sedang berjuang membangun keluarga sejahtera dengan dukungan komitmen pemerintah yang kuat dan kerjasama akrab dari masyarakat yang penuh kedamaian. (*Prof. Dr. Haryono Suyono, Pengamat Masalah Sosial Kemasyarakatan*). *kbmandiri-222002*.

## MELAKSANAKAN AMANAT RAKYAT

Di penghujung tahun 2001, bangsa Indonesia melaksanakan tiga kegiatan yang sangat penting secara serentak. Pertama, Sidang Tahunan MPR 2001 dengan diawali peristiwa saling dorong yang menghebohkan. Kedua, Sidang CGI (*Consultative Group on Indonesia*) yang untuk pertama kalinya diadakan di Jakarta. Dan ketiga, melaksanakan satu kegiatan kecil yang bermakna, yaitu meresmikan penyerahan kredit untuk para Ibu-ibu sebagai pelaku ekonomi kerakyatan yang membumi di wilayah Karesidenan Surakarta, di Sragen, Jawa Tengah.

Ketiga kegiatan itu sengaja kita catat karena ketiganya merupakan tanggapan yang positif terhadap amanat penderitaan rakyat. Amanat itu harus diperhatikan dan diselesaikan secara serentak karena selama tiga tahun ini, semenjak krisis moneter yang kemudian berkepanjangan menjadi krisis multidemensi yang kompleks, rakyat tidak sabar lagi menunggu. Mereka sudah demikian terpuruk, tingkat kemiskinan yang pernah menurun justru meningkat kembali. Tidak itu saja, kelangkaan program-program dan kegiatan pembangunan yang diperdebatkan dengan hangat di lembaga-lembaga formal, media massa, telah menjadikan rakyat di pedesaan rindu. Mereka menginginkan agar berbagai kegiatan yang nampaknya berskala “raksasa” itu segera diturunkan dan disampaikan kepada rakyat di pedesaan. Makin lama berbagai rancangan kegiatan itu dibicarakan, makin membuat rakyat banyak tidak yakin lagi kapan hasil perdebatan itu membumi ke desa mereka.

Mereka mempunyai perasaan yang campur aduk. Mereka gembira nasibnya dibicarakan dalam Sidang Tahunan MPR, sampai-sampai dibela dengan saling dorong dan adu argumentasi yang sangat sengit. Tetapi mereka tidak rela dan malu kalau dengan alasan membela rakyat kita harus mengembangkan budaya baru saling berantem antar saudara sendiri. Mereka sedih kalau kepentingan daerah tidak didengar lagi, sampai-sampai ada yang menganjurkan “korek kuping” dulu sebelum sidang. Tetapi mereka tidak yakin kalau anggota MPR dari daerahnya tidak berjuang di Sidang yang terhormat itu. Mereka minta bahwa perjuangan itu tetap dilakukan dengan penuh kekraban, kedamaian dan persatuan yang menyejukkan. Mereka memerlukan suasana itu untuk bisa tetap hidup biarpun dalam keterbatasan, tetapi bisa terus membangun dengan apa yang mereka miliki di daerah, dalam lingkungan keluarga dan masyarakat yang penuh kedamaian.

Dalam kesedihan itu mereka sadar bahwa bangsa ini harus mengurangi hutang. Tetapi mereka juga menyadari bahwa bangsa ini sudah begitu terpuruk karena mereka merasakannya dengan jelas di desanya, di kampungnya, dan pada dirinya sendiri. Mereka sadar bahwa untuk itu pemerintah masih terpaksa harus berhutang untuk membangkitkan kembali perekonomian nasional. Oleh karena itu mereka sangat gembira mendengar penuturan Menko Perekonomian, Prof. Dr. Dorijatun Kuntjoro Jakti, bahwa kita berhasil mendapatkan kepercayaan negara-negara donor dengan pinjaman baru sebesar Rp. 31 triliun. Mereka mencatat dengan penuh harapan bahwa sebagian dari pinjaman itu akan disediakan untuk melanjutkan upaya pengentasan kemiskinan.

Pada tingkat lapangan, di wilayah bekas Karesidenan Surakarta, di Kabupaten Daerah Tingkat II Sragen, Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan (Meneg PP), dengan didampingi Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sragen dan Wakil Ketua I Yayasan Dana Sejahtera Mandiri (Yayasan Damandiri), meresmikan dan menyerahkan akad kredit dari Bank Bukopin dan Bank BPD, dengan dana dari Yayasan Damandiri, untuk para ibu-ibu yang siap maju. Lima tahun lalu sebagian besar Ibu-ibu tersebut adalah keluarga pra sejahtera, keluarga sejahtera I atau keluarga miskin, yang sekarang telah makin maju dan bergabung dalam Jaringan Perempuan Untuk Usaha Kecil (Jarpuk) atau Jaringan Warung Ibu Mandiri (Riung Iman). Dengan kredit modal kerja yang diterima itu mereka akan memperluas Jaringan Warung Sudara YIS.

Bagi Ibu-ibu maju tersebut, peristiwa itu mereka sambut dengan penuh antusias karena mereka sadar bahwa hanya dengan bekerja keras mereka bisa membangun keluarganya dan melepaskan diri dari belenggu kemiskinan. Banyak dari Ibu-ibu yang hadir dalam peristiwa bersejarah itu telah belajar menabung dan mengikuti pelatihan berbagai instansi. Mereka juga telah mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh Yayasan Indonesia Sejahtera (YIS) yang sifatnya profesional sebagai bekal menyiapkan diri menjadi usahawan mandiri yang sanggup bersaing.

Mereka juga telah mengikuti berbagai upaya dengan skim yang berbeda-beda. Untuk melepaskan diri dari lembah kemiskinan banyak dari mereka telah pernah menerima hibah atau bantuan. Mereka mengakui bahwa bantuan itu biasanya tidak berkelanjutan. Biasanya tidak cukup untuk melepaskan diri dari lembah kemiskinan. Pengalaman dengan sistem dukungan kredit yang bertahap, pelatihan dan pendampingan yang konsisten, dapat dianggap sebagai cara yang lebih mantap. Perkenalan dengan lembaga keuangan pedesaan dapat dianggap sangat mendidik dan memberi kesempatan untuk bekerja keras karena setiap peserta harus sadar bahwa mereka sedang berhutang. Mereka sadar bahwa seseorang yang berhutang harus membayar lunas agar hidupnya tenang dan sejahtera, di dunia dan di akherat nanti.

Pengalaman para Ibu yang dibina oleh YIS tersebut sangat mirip dengan pengalaman dari kelompok lain yang dibina oleh para Dosen dari Universitas Negeri Sebelas Maret (UNS) dan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta (STIES) di Solo. Ibu Irah yang sekarang mahir membuat tas merasa yakin bahwa dengan pembinaan yang berkelanjutan dan ikhlas, serta tambahan modal seperlunya, usaha yang digelutinya akan makin maju. Bapak, Ibu Listianto dan keluarganya, yang sekarang bergelut menciptakan peralatan kecil dari kaca-kaca dengan ukiran berseni, makin yakin bahwa usaha yang ditekuni selama ini bisa menarik pembeli dan bisa dipasarkan sampai ke manca negara.

Dengan pengalaman itu, peresmian akad kredit yang sederhana dari Bank atau Lembaga Keuangan di lapangan itu, memberi bukti bahwa keluarga tertinggal, keluarga yang semula miskin, tidak harus diperlakukan seperti pengemis yang dijejali dengan hibah. Mereka bisa dan merasa sangat terhormat apabila diperlakukan seperti layaknya pengusaha yang mandiri, pendampingan profesional dan kesempatan kredit dengan bunga pasar dari lembaga keuangan atau Bank yang akrab dan memihak kepada mereka. Mereka menghormati para pendukung dari lembaga keuangan di daerah yang akrab dengan persoalan yang mereka hadapi.

Mudah-mudahan dua peristiwa nasional dan internasional di Jakarta ini, segera diikuti dengan langkah-langkah nyata di daerah seperti di Sragen tersebut. Dan dukungan untuk pengentasan kemiskinan segera disalurkan kepada rakyat secara tepat melalui lembaga keuangan di daerah yang akrab dan betul-betul memihak keluarga miskin. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkati langkah-langkah mulia untuk memberdayakan keluarga miskin di Indonesia itu. Semoga. (*Prof. Dr. Haryono Suyono, Pengamat Masalah Sosial Kemasyarakatan*)

## MEWUJUDKAN INDUSTRI KELUARGA

Selama satu bulan di bulan Juni 2002 secara berturut-turut telah diadakan Seminar dan Pertemuan untuk memperingati Hari Keluarga Nasional (Harganas) yang secara resmi diperingati setiap tanggal 29 Juni . Peringatan Harganas 2002 yang diresmikan Ibu Presiden Megawati Soekarno Putri di Gorontalo membahas berbagai tantangan dalam menghadapi era globalisasi, keluarga Indonesia harus menyiapkan diri dengan menghidupkan seluruh fungsi keluarganya dan membangun kekuatan industri atau kekuatan ekonomi keluarga di desa tempat tinggalnya. Keluarga Indonesia yang tidak seluruhnya mampu mandiri harus dipersiapkan menjadi keluarga mandiri dengan pemberdayaan yang utuh agar setiap anggota dapat memberikan sumbangan dalam pembangunan.

Di daerah perkotaan, khususnya di DKI Jakarta, telah mulai dikembangkan Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK) dengan memanfaatkan institusi kemasyarakatan di kelurahan-kelurahan secara langsung. Program itu mengambil basis masyarakat Rukun Warga (RW) dan masyarakat Rukun Tetangga (RT). Untuk keperluan itu pada tingkat kelurahan dibentuk suatu institusi baru yang dinamakan Dewan Kelurahan atau populer dengan singkatan Dekel yang bertindak sebagai penampung aspirasi masyarakat yang ada di tingkat akar rumput. Lembaga Dekel dianggap sebagai sebuah langkah maju dan bijak yang diambil Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dalam menyikapi perubahan-perubahan otonomi dewasa ini.

Secara khusus program ini menyikapi Undang-Undang Nomor 34 tahun 1999 tentang Pemerintahan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta, dengan mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2001, yaitu dengan membentuk dan memberi kesempatan kepada setiap Dekel ikut menentukan warna pembangunan yang ada di wilayah kelurahan, RW dan RT-nya. Dekel itu menampung program, membantu melaksanakan program dan sekaligus ikut bertindak sebagai pengawas dari berbagai upaya pembangunan di tingkat RT dan RW.

Pada tingkat pedesaan, selama ini ada organisasi yang kuat dan berakar dikalangan ibu-ibu, yaitu PKK yang dulu merupakan singkatan dari Pembinaan Kesejahteraan Keluarga. Dalam pendekatan reformasi, singkatan itu diubah artinya menjadi Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga yang intinya bertugas menjadi wadah untuk memberikan dukungan aktif terhadap upaya pemberdayaan keluarga-keluarga, terutama keluarga kurang mampu yang ada di pedesaan.

Pada masa lalu PKK mempunyai sepuluh program pokok antara lain dalam bidang kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial pada umumnya. Sekarang, Ketua Umum Tim Penggerak PKK Pusat telah memberi kepercayaan kepada setiap pengurus PKK di daerah untuk mengembangkan program yang cocok dengan perkembangan daerahnya, sehingga satu PKK dengan PKK lain tidak mempunyai program yang seragam karena tidak ada program yang diarahkan dari atas lagi. Sifat program, seperti halnya Dekel di daerah perkotaan, adalah menampung apa yang menjadi permintaan

masyarakat di tingkat akar rumput atau di tingkat pedesaan. Program-program PKK itu diharapkan lebih banyak mengarah kepada bagaimana keluarga-keluarga yang ada di daerah dapat memanfaatkan kemampuan, ketersediaan materi dan permintaan yang ada pada tingkat pedesaan. Keluarga di pedesaan diharapkan mengembangkan industri di desanya masing-masing sebagai kekuatan komplementer terhadap bidang pertanian.

Dalam rangka pengembangan dan pemberdayaan keluarga di seluruh Indonesia ada baiknya lembaga-lembaga seperti Dekel dan PKK ini bergerak antisipatif dan dibantu untuk menolong keluarga-keluarga kurang mampu mempersiapkan diri dengan berbagai program dan kegiatan yang mengarah pada usaha menolong keluarga itu. Karena kedekatan mereka dengan masyarakat dan keluarga pedesaan, maka lembaga seperti Dekel dan PKK dapat menampung aspirasi yang berkembang di tingkat perkotaan atau di tingkat pedesaan. Mereka sekaligus dapat pula menjadi *advokator* yang merangsang berkembangnya motivasi untuk mengembangkan *demand baru* yang banyak manfaatnya untuk pengembangan keluarga yang sejahtera dan mandiri.

Untuk menjadikan lembaga-lembaga menjadi kekuatan pembangunan ekonomi yang paripurna, diharapkan setiap desa dilengkapi dengan lembaga keuangan mikro sehingga kemampuan advokasinya lengkap dengan dukungan pendanaan yang kuat. Advokasi mereka dapat betul-betul membantu pemberdayaan ekonomi atau industri kerakyatan di tingkat pedesaan dan di tingkat perkampungan di kota-kota. Pembentukan atau pengadaan lembaga keuangan mikro di tingkat pedesaan itu dapat diserahkan atau bekerja sama dengan pemerintah daerah atau di provinsi yang bersangkutan dan bank-bank yang ada di daerah tersebut.

Lembaga keuangan mikro yang sekaligus dikaitkan dengan bank adalah agar keluarga yang mungkin saja mempergunakan jasa lembaga keuangan mikro di kemudian hari dapat dituntun dan diarahkan untuk bisa langsung mempergunakan kekuatan dan jasa Bank yang dananya bisa berasal dari sumber-sumber masyarakat dan sumber lainnya. Dengan cara demikian, masyarakat dapat melaksanakan kegiatan dengan basis yang makin kuat karena di masa depan tidak seorang pun boleh menganggur.

Setiap keluarga dalam fungsinya sebagai kekuatan ekonomi kerakyatan dapat diarahkan untuk makin dekat dengan lembaga keuangan mikro yang ada di daerahnya. Sebaliknya setiap lembaga keuangan dapat diarahkan untuk memihak keluarga kurang mampu dengan diwajibkan memberikan syarat-syarat khusus untuk penyaluran dananya. Misalnya, diberikan dengan dua syarat utama, yaitu berapa banyak masyarakat dan anggota keluarga kurang mampu yang diuntungkan dan berapa besar dana lembaga itu bisa menolong keluarga kurang mampu yang mau bekerja, baik secara langsung maupun dengan dengan cara bekerja pada orang yang mempunyai pengalaman usaha sendiri.

Kedua syarat itu akan memberi kesempatan kepada para anggota keluarga kurang mampu untuk mendapatkan kesempatan kerja, baik langsung sebagai nasabah atau tidak langsung ikut serta pada mereka yang telah mempunyai usaha yang tingkat produktifitasnya tinggi. Bekerja langsung bagi keluarga kurang mampu artinya setiap keluarga mempunyai usaha mandiri akan memberi makna yang sama dengan bekerja pada keluarga atau usaha lain yang akan mempekerjakan anggota keluarga kurang

mampu. Dengan arahan tersebut lembaga keuangan mikro akan menjadi pelengkap yang baik sekali di tingkat pedesaan. Setiap keluarga berpartisipasi aktif dalam pembangunan industri keluarga di pedesaan tanpa kendala kekurangan modal. (*Prof. Dr. Haryono Suyono, Pengamat Masalah Sosial Kemasyarakatan*)-Pengantar-Harganas-172002.

## DARI PENERIMA TITIPAN SAMPAI TOSERBA

Upaya pendekatan pemberdayaan sumber daya manusia secara langsung harus diarahkan kepada keluarga kurang mampu. Upaya itu terkenal sebagai pendekatan *Inpres Desa Tertinggal (IDT)* untuk menolong keluarga miskin di **22.800 desa tertinggal**. Pada desa lain, sekitar **43.000 desa** yang dianggap tidak tertinggal, dilakukan upaya lain secara serentak dengan dukungan *Yayasan Damandiri* untuk menolong keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I. Upaya tersebut bersifat rangsangan membangun gerakan pemberdayaan mandiri melalui latihan menabung *Takesra* dan latihan kewirausahaan dengan dukungan kredit *Kukesra*. Disamping itu banyak program lain yang mengantar keluarga miskin seperti *Program P4K* melalui Departemen Pertanian dan *Program KUBE* melalui Departemen Sosial.

Dalam pengembangannya program itu diteruskan dengan dukungan lain oleh berbagai instansi dan lembaga swadaya masyarakat. Sebagaimana gerakan massal pada umumnya, yang kadang-kadang terhambat jaminan komitmen dan kelangsungannya, upaya-upaya itu tidak membawa hasil yang seragam. Ada daerah-daerah maju karena mempunyai kepemimpinan lokal yang kuat komitmennya dan meneruskan program itu dengan sumber daya dan sumber dananya sendiri secara mandiri. Di daerah-daerah seperti ini masyarakat beruntung karena proses belajarnya mendapat bimbingan dan pendampingan yang berkelanjutan. Hasilnya nyata, bukan saja kepuasan fisik banyak keluarga kurang mampu yang berhasil mandiri, tetapi para pelaku dan para pendampingnya mendapat kepuasan batin bahwa amal ibadahnya diterima oleh Tuhan Yang Maha Esa berupa kesejahteraan yang lebih baik dari masyarakat yang ditolongnya.

Di daerah-daerah yang *komitmen* dan *kepemimpinan lokalnya* relatif rendah atau tidak berkesinambungan, masyarakat dan keluarga kurang mampu biasanya mandeg ditengah jalan, dan programnya gagal. Keluarga kurang mampu yang baru bergerak dan belajar wirausaha biasanya tidak akan atau belum siap menghadapi badai persaingan dan cemoohan atas kualitas produksi dan pelayanannya yang sederhana. Usaha itu biasanya segera mandeg karena para pesertanya putus asa, kembali hidup miskin dengan melanjutkan kehidupan seadanya, termasuk kalau terpaksa mengeluarkan anaknya dari sekolah untuk membantu mencari nafkah dengan *“nrimo”* atas upah sebagai buruh harian yang sangat murah.

Namun, apapun hasilnya, ada pula luberan yang menarik dan bisa diangkat sebagai titik-titik terang untuk mendorong dan melanjutkan proses pemberdayaan mandiri. Dorongan ini harus terus dipelihara dan selalu disegarkan agar masyarakat akhirnya bisa dan berkesempatan mengatasi persoalannya secara mandiri. Dengan upaya mandiri itu diharapkan uluran tangan pemerintah akan memperkuat usaha itu. Kita tidak boleh berkecil hati, karena dimasa lalu, tingkat kemiskinan pernah mencapai 11 persen pada tahun 1966. Ini berarti, kalau mau, kita bisa mengerem tingkat kemiskinan itu dan menurunkannya menjadi lebih kecil lagi.

Sejak empat tahun lalu, lebih-lebih dalam alam otonomi daerah akhir-akhir ini, Yayasan Damandiri secara gencar berusaha melanjutkan upaya pemberdayaan mandiri

itu dengan merangkul *Bank Pembangunan Daerah (BPD)*, *Bank Bukopin*, *Bank Perkreditan Rakyat (BPR)* dan lembaga keuangan pedesaan lainnya. Dalam pendekatan itu diharapkan bahwa otonomi daerah memungkinkan pimpinan daerah untuk dengan dukungan pemerintah pusat mengembangkan strategi sederhana yang bisa dilaksanakan oleh rakyat banyak dengan mudah atau strategi yang tidak merugikan para pelaksana Bank tetapi juga sangat mempermudah keluarga kurang mampu mengembangkan pemberdayaan dan kewirausahaan secara mandiri.

### ***Kisah Ibu Sugiono***

Tersebutlah kisah menarik dari (*sebut saja*) ***Ibu Sugiono*** dari Malang. Ibu yang baik ini adalah isteri dari seorang pegawai negeri yang tekun dan rajin, bernama Bapak Sugiyono. Dimasa lalu, sebagai pemimpin keluarga dan pegawai negeri golongan menengah yang baik, Bapak Sugiono selalu mengajak isterinya mengikuti pertemuan Dharma Wanita di kantornya. Sebagai isteri pegawai negeri yang tinggal di kampung, Ibu Sugiono dianggap sebagai seorang "*tokoh elite*" yang berpengaruh di kampungnya. Karena itu Ibu Sugiono juga ikut serta dalam gerakan PKK di kampungnya dengan rajin.

Di kantor suaminya, Ibu Sugiono bukan tokoh nomor satu dalam lingkungan Dharma Wanita, karena ada isteri kepala bagian dan kepala dinas yang dianggap senior. Tetapi di kampungnya, Ibu Sugiono sangat dihormati, dituakan dan dianggap sebagai tokoh dan dipilih sebagai orang nomor dua yang dianggap pantas mendampingi isteri kepala desa sebagai, *katakanlah*, Ketua Harian PKK-nya. Sebagai tokoh yang disegani, Ibu Sugiono selalu mengikuti gerakan pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan keluarga atau kursus-kursus kewirausahaan yang diadakan organisasinya. Dia menjadi salah satu pemimpin kelompok yang tugasnya mengantar anggota keluarga kurang mampu melepaskan dirinya dari lembah kemiskinan.

Pada waktu kelompok di desa mulai membentuk kegiatan ekonomi produktif, kelompoknya melalui anggotanya mulai membuka usaha warung-warung kecil di masing-masing kampung atau RT-nya. Sebagai ketua kelompok, Ibu Sugiono, jika kebetulan ke kota mengikuti pertemuan ibu-ibu dimana suaminya bekerja, selalu menampung titipan belanja kebutuhan warung-warung anggota kelompoknya di toko yang lebih besar. Harga barang kebutuhan di toko yang lebih besar itu, karena seringnya Ibu Sugiono berbelanja, lebih murah dibanding di toko lainnya. Ibu Sugiono dianggap pembeli besar untuk warung-warung binaan organisasi PKK-nya.

Kebiasaan menjadi penampung titipan ini, pada saat krisis ekonomi melanda tanah air kita, sangat menolong rakyat di desa mendapatkan barang-barang dengan harga yang relatif lebih murah. Tetapi kebiasaan ini menimbulkan juga ide bagi Ibu Sugiono untuk membuka "*warung grosir*" di rumahnya sendiri. Ibu Sugiono pusing mencari modal untuk melaksanakan ide ini dan mempergunakan kesempatan yang terbuka. Sebagai pegawai negeri, gaji bulanan suaminya hanya cukup untuk keperluan sehari-hari dan tidak ada sisa untuk tabungan, apalagi untuk membuka warung sendiri.

Gerakan pemberdayaan mandiri dengan dukungan *Bank Bukopin dan Yayasan Damandiri* membuka kesempatan program "*Pundi*" dan "*Warung Sudara*"

sebagai kelanjutan program Kukesra atau program pemberdayaan lain sebagai kesempatan bagi ibu-ibu yang mampu membantu pemberdayaan secara mandiri, antara lain melalui jaringan warung semacam itu. Untuk mempergunakan kesempatan Program Pundi dan Program Warung Sudara itu keluarga Sugiono yang mewarisi rumah dan tanah di desa itu dianjurkan untuk menyempurnakan surat-surat rumah dan tanahnya menjadi sertifikat resmi. Untuk itu Bank dan Pemda setempat telah diajak membantu percepatan proses pengurusan surat-surat itu.

Dengan modal surat sertifikat rumah dan tanah yang resmi itu, satu tahun yang lalu, Ibu Sugiono dibantu mendapatkan pinjaman *dana Pundi* Bank Bukopin melalui *Koperasi Swamitra Dinoyo*, yang berdekatan dengan kantor suaminya. Dari Swamitra Dinoyo itu Ibu Sugiono mendapatkan kredit pertama untuk mulai membuka warung pribadi yang kecil di halaman rumahnya sendiri.

Kesempatan yang terbuka itu dipergunakan dengan baik dan usahanya melaju dengan cepat. Dalam waktu yang sangat singkat warung kecil itu berubah menjadi pusat grosir untuk para anggota di kampungnya dan Ibu Sugiono terpaksa harus dibantu oleh anak-anak perempuan muda DO SLTP dan DO SMU di kampungnya melayani warung-warung kecil dan masyarakat sekitarnya. Setelah pinjaman pertamanya lunas, Ibu Sugiono berhak mendapat pinjaman kedua yang lebih besar. Dengan pinjaman yang lebih besar itu sejak sebulan lalu, Ibu Sugiono telah membangun warung yang lebih besar di halaman rumahnya, suatu *toko serba ada* atau *Toserba 'Ibu Ono'*; *'selalu sedia apa saja'* yang dibutuhkan masyarakat di kampungnya. Ibu Sugiono, isteri seorang pegawai negeri yang sederhana, telah berubah dari sekedar penolong menampung titipan belanja para anggota binaannya keluarga kurang mampu, sekarang telah menjadi penolong, pengusaha Toserba yang terhormat dengan jaringan warung Sudara yang sebelumnya adalah keluarga kurang mampu. Pengetasan kemiskinan bisa dilakukan oleh masyarakat dengan dukungan penuh komitmen aparat yang luwes dan memihak mereka.

#### *Dari Warisan sampai Jasa Foto Kopi*

Kasus Ibu Sugiono bukan satu-satunya *'kebangkitan'* Ibu-ibu di Desa dalam proses pemberdayaan secara mandiri. Ibu Karto yang rumahnya tidak terlalu jauh dari Pasar Dinoyo juga merupakan seorang pahlawan pengentasan kemiskinan yang tidak tercatat di kantor manapun. Ibu Karto kebetulan mempunyai rumah di pinggir jalan. Sebagai rumah warisan yang letaknya dipinggir jalan Ibu Karto sudah lama menerima godaan untuk menjual rumah itu kepada investor yang selalu berseliweran menawarkan kompensasi yang menggiurkan. Ibu Karto yang suaminya bekerja seadanya memang tidak miskin, tetapi juga tidak kaya. Ibu Karto selalu di rumah semasa muda memong anak-anaknya dan mengantar anak-anak itu bersekolah seadanya. Setelah anak bertambah besar memang terasa sangat berat karena biaya sekolah anak-anaknya bertambah besar dan penghasilan suaminya makin tidak memadai untuk hidup selayaknya. Godaan untuk menjual rumah dan tanahnya yang terletak di pinggir jalan makin menjadi-jadi. Tetapi karena rumah dan tanah itu adalah warisan, ibu Karto dan suaminya takut kepada kedua orang tuanya yang mewarisi rumah dan tanah itu kepadanya yang harus diturunkan kepada anak cucunya kelak.

Dalam gerakan pemberdayaan keluarga secara mandiri Pundi dan Warung Sudara yang dilaksanakan oleh Bank Bukopin dengan dukungan dana dari yayasan Damandiri, ibu Karto diberikan kesempatan untuk membuka usaha dengan dukungan kredit dari Bank. Ibu Karto merasa tidak mampu membuka usaha, karena tidak cukup sekolah dan anak-anaknya relatif masih kecil dan pak Karto sendiri sibuk sebagai karyawan suatu usaha swasta yang segan untuk ditinggalkannya.

Dengan bimbingan seperlunya dianjurkan kepada Ibu Karto untuk membuka usaha foto kopi dan dianjurkan untuk mengajak anak-anak tanggung drop out SLTP atau SMU yang ada di desanya. Setelah diskusi dan perundingan yang matang, maka akhirnya keluarga Karto, khususnya Ibu Karto sepakat untuk membuka usaha itu di rumahnya. Ibu Karto dengan agunan rumah dan tanah warisan orang tuanya, Ibu Karto diberi pinjaman oleh Swamitra Dinoyo untuk membuka Warung Pelayanan Foto Kopi di rumahnya. Untuk itu bagian depan rumahnya disulap menjadi warung yang melayani foto kopi itu.

Dengan usaha foto kopi itu Ibu Karto mengubah warisan yang diterima dari orang tuanya, suatu aset yang tadinya mati, atau relatif mempunyai nilai ekonomi sangat rendah karena hanya ditempati oleh Pak Karto dengan keluarganya, sekarang telah menjadi aset hidup yang mengubah kehidupan Ibu Karto yang tadinya ketakutan karena budget untuk memelihara keluarganya bertambah besar, sekarang hidup rukun dan makmur karena telah mempunyai usaha foto kopi yang laris. Ibu Karto telah ikut menolong tiga anak remaja perempuan drop out SLTP dan SMU bekerja secara penuh di warung foto kopinya. Bank Bukopin dengan Swamitra Dinoyo telah berhasil membantu keluarga Karto mengubah aset matinya menjadi modal kerja yang menghidupi dan mengentaskan keluarga miskin di sekitarnya.

Mudah-mudahan hal-hal yang nampaknya kecil tetapi sangat menyentuh hati nurani rakyat kecil itu mendapat perhatian ***Ibu Presiden Megawati Soekarnoputri*** bersama para Menteri yang sekarang ini sedang giat menyegarkan kembali semangat membangun secara mandiri dan sekaligus mengatasi kemiskinan di negara yang sesungguhnya kaya ini. (*Prof. Dr. Haryono Suyono, Pengamat Masalah Sosial Kemasyarakatan*). – *MiskinAset-3032002*.

## PERSAHABATAN LANSIA

**Banyak kalangan menolak modernisasi karena dengan itu akan kehilangan ciri ketimuran yang penuh dengan persahabatan. Untuk melindungi dirinya, orang-orang semacam itu terutama penduduk negara berkembang yang percaya bahwa masa lampau penuh dengan keakraban dan kepadatan budaya, menolak pembangunan yang diperkirakan akan mempertipis solidaritas dan persahabatan itu. Ada kalanya mereka menolak didirikannya sekolah di sekitar perkampungan. Alasannya, kalau sekolah itu harus didirikan, terpaksa sekolah itu harus didirikan di tengah sawah yang jauh dari permukiman. Padahal, di tengah kampung masih banyak tanah kosong yang bisa dijadikan pusat pendidikan dan sekaligus pusat peradaban baru.**

Karena itu di desa-desa tertinggal, termasuk di sekitar 22.000 desa yang tergolong desa sangat miskin, tidak banyak dijumpai sekolah-sekolah dasar, sekolah lanjutan tingkat pertama, sekolah menengah kejuruan (SMK) atau sekolah menengah umum (SMU). Alasannya cukup menggelitik, karena para pejabat menyatakan bahwa di desa itu tidak banyak murid-muridnya yang sekolah, biarpun anak-anak usia sekolah sama banyaknya dibandingkan dengan anak usia sekolah di desa yang tidak miskin.

Dengan adanya krisis keuangan sekitar tahun 1997, dan yang berlanjut menjadi krisis ekonomi yang berkepanjangan, dapat diperkirakan bahwa jumlah penduduk miskin meningkat dan anak-anak yang tidak sekolah juga pasti meningkat. Bahkan kalau penduduk miskin asli tidak bertambah, pasti ada tambahan penduduk miskin yang mungkin bukan berasal dari keluarga yang sebelumnya sudah miskin, tetapi adalah dari keluarga-keluarga yang semula justru tidak miskin. Mereka itu umumnya adalah pekerja-pekerja yang kehilangan pekerjaannya karena industri atau usaha dimana mereka bekerja terpaksa tutup karena terbelit hutang, atau karena usaha-usaha dimana mereka itu bekerja mempergunakan banyak sekali bahan baku yang berasal dari luar negeri.

Proses penanganan kemiskinan di masa lalu mengkonsentrasikan diri pada upaya menolong mereka yang sudah terlanjur miskin, yaitu orang tua dan mereka yang dianggap bertanggung jawab dalam setiap keluarganya. Dengan makin maraknya program pengentasan kemiskinan, tiba waktunya untuk mengubah strategi pengentasan kemiskinan dengan lebih banyak berkonsentrasi pada upaya pemberdayaan generasi muda, terutama anak-anak perempuan dari keluarga yang dianggap kurang mampu itu.

Cara ini dipandang lebih efektif, terutama kalau dibandingkan dengan pemberian dukungan kepada keluarga lain yang sudah sangat tua dan tidak mampu lagi bergerak secara lincah atau jompo. Lain halnya kalau orang tua itu masih segar bugar, usia berkisar antara 50 – 60 tahun dan secara fisik intelektual masih segar, berpikiran jernih dan cemerlang. Orang-orang semacam ini ada dimana-mana, di desa yang sangat miskin atau di desa yang dianggap tidak terlalu miskin. Dengan adanya Hari Pendidikan Nasional yang diperingati setiap tanggal 2 Mei dan Hari Lanjut tanggal 29 Mei, kita pantas merenung bagaimana kedua kekuatan maha besar itu bisa

“dikawinkan” dalam suatu sinergi yang menguntungkan masa kini dan masa depan yang lebih gemilang.

Karena itu dalam suasana bulan Mei yang penuh hari bersejarah itu, lebih-lebih pada Hari Kebangkitan Nasional yang diperingati setiap tanggal 20 Mei, kekuatan potensi bangsa itu harus dipadukan menjadi kekuatan maha besar untuk mendorong bangkitnya bangsa yang memang besar ini. Kekuatan pendidikan yang mulai tahun ini menempuh pendekatan “*Broad-Based Education*” yang mempersiapkan anak didik supaya bisa siap untuk bekerja. Pendekatan ini mirip seperti pendekatan SMK Negeri di Malang yang dilaksanakan dengan sangat baik. Disamping itu para lansia, yang tanggal 16 Mei 2002 lalu berkumpul di Jakarta, telah menyepakati suatu keyakinan bahwa yang masih potensial akan tetap melanjutkan pengabdianya kepada tanah air, Nusa dan bangsanya.

Untuk mengembangkan BBE itu para lansia dapat menjadi “pagar peduli” yang sekaligus mengembangkan suasana “persahabatan yang dinamik” untuk merangsang peningkatan kemampuan usaha anak-anak bangsa yang ada di sekolah-sekolah itu. Para lansia dapat mengatur bersama bagaimana membantu anak-anak itu meningkatkan kemampuannya dalam olah usaha dengan membuka usaha di sekitar pusat-pusat pendidikan yang ada. Ini harus dimulai dengan kemauan para lansia yang tinggi untuk terlebih dulu belajar pada Universitas Usia Ketiga. Selanjutnya mereka bisa terjun aktif dalam pengabdian sesama agar makin lapang jalan para lansia itu menuju sorga.

Sementara itu kelompok atau keluarga-keluarga lansia yang menjadi pagar peduli atau pagar persahabatan itu dapat dikembangkan menjadi keluarga yang sejahtera dan berhasil. Keluarga yang berhasil itu, ditambah dengan kelompok-kelompok baru akan saling melakukan pembinaan kepada anak-anak didik yang harus dititipkan oleh sekolahnya kepada usaha atau kepada warungnya sehingga para lansia yang mengasuh warung atau usaha dapat secara intensif ikut mendidik anak-anak itu untuk menguasai secara praktis bidang usaha yang diperlukannya untuk mengasah kemampuan intelektualnya di masa depan.

Dukungan dari para lansia dengan usahanya itu akan sangat bermakna untuk memperluas dan mempertajam kegiatan usaha dalam olah BBE yang tidak harus diadakan di sekolah, tetapi bisa diadakan di kampung atau di rumah-rumah di sekitar sekolah atau di sekitar kampus. Dengan cara demikian, generasi muda, anak-anak dan gurunya, akan menjadi lebih terkait dalam persahabatan yang menjadikan keluarga di sekitar sekolahnya dengan dunia usaha yang digelutinya bisa menjadi idola yang dihormati. Sebaliknya sekolah sebagai lahan untuk mendidik anak-anak mereka bisa menjadi suatu sahabat yang menguntungkan, dan sekolah tidak harus ditolak kehadirannya di desa, tidak harus didirikan di tengah sawah yang tidak ada penghuninya. (Prof. DR. Haryono Suyono, Pengamat Sosial Kemasyarakatan)-*Pengantar Pagar Peduli-2052002*

# MENYONGSONG KARIER KEDUA MELALUI PENGABDIAN DAN USAHA PRODUKTIF

**Peringatan Hari Lansia Nasional setiap tanggal 29 Mei menjadi renungan apa yang dapat dikerjakan untuk menolong para lansia menyongsong karier kedua melalui pengabdian dan usaha produktif yang berguna untuk anak cucu, nusa dan bangsanya.**

Dengan perkembangan ekonomi dan industri yang bertambah baik, sejak akhir abad ke 19 negara-negara Eropa dan Amerika Utara berhasil memperbaiki kesejahteraan rakyatnya. Akibatnya struktur penduduk bertambah tua. Usia harapan hidupnya secara perlahan dan sistematis makin menakjubkan. Penduduk dengan usia harapan hidup diatas 65 tahun atau diatas 70 tahun, bahkan diatas 80 tahun, bertambah banyak.

Negara-negara berkembang biarpun tidak mengulangi pengalaman industrialisasi seperti negara-negara di Eropa, bisa berubah struktur penduduknya melalui program pembangunan, khususnya perbaikan dalam bidang kesehatan dan keluarga berencana. Struktur penduduknya juga bertambah tua. Melihat perkembangan itu, pada tahun **1990 PBB** sepakat menjadikan tanggal **1 Oktober** sebagai **Hari Lanjut Usia Internasional** untuk meningkatkan perhatian dan komitmen mendukung *penduduk usia lanjut*.

Sebagai salah satu anggota negara-negara berkembang yang mengalami perubahan struktur penduduk karena pembangunan, Indonesia tidak terlalu ketinggalan. Bangsa kita telah berhasil menyepakati suatu **Undang-Undang** tentang **Kesejahteraan Lanjut Usia** pada akhir tahun **1998**, dan kita telah sepakat pula menjadikan tanggal **29 Mei** sebagai **Hari Lanjut Usia Nasional**. Apabila tidak diingatkan hari penting itu bisa lewat tanpa kesan. Padahal dengan jumlah **warga lanjut usia, berusia 60 tahun atau lebih**, sekitar **15 - 17 juta jiwa**, para lansia bisa berbuat banyak untuk nusa dan bangsanya.

## ***Peningkatan Jumlah Lansia***

Dalam sensus penduduk 2000 yang lalu tercatat kenaikan jumlah penduduk lansia yang jauh lebih cepat dibandingkan dengan semua kategori usia lainnya. Perubahan struktur yang umumnya terjadi di negara-negara maju juga terjadi di Indonesia. Sehingga penggarapan dan pelayanan penduduk atau warga usia lanjut disini harus diubah karena kita berharap **masa depan** bangsa adalah masa depan suatu **masyarakat Indonesia baru yang bermoral, menghargai orang tua dan mengusahakan masa tua itu sejahtera**. Oleh karena itu **perhatian kepada para lansia harus mencerminkan nilai-nilai luhur masyarakat yang bermoral tersebut**. **Perhatian** itu **harus dimulai dari setiap keluarga** dimana **“insan yang lansia”** harus bisa **menikmati hidup masa tua yang tentram** karena berada dalam lingkungan keluarga yang akrab, penuh rasa cinta, perdamaian dan ketentraman lahir dan batin. Dalam suasana seperti itu, para sesepuh atau lansia, yang mungkin saja secara fisik

tidak bisa banyak berbuat, harus diusahakan tetap merasa dihormati dan dibutuhkan karena dianggap memiliki wibawa, kearifan, dan kemampuan dukungan mental dan spiritual yang tinggi menyejukkan

Karena itu kita harus bisa *menyiapkan keluarga* untuk *mampu* menjadi *lembaga pertama dan utama dalam mengembangkan budaya hormat pada orang tua. Untuk itu keluarga harus bisa menumbuhkan budaya perlindungan kepada lansianya.* Keluarga harus bisa *memberdayakan dan membekali anak-anak dan cucu-cucunya dengan budaya itu.* Untuk itu *setiap keluarga* harus dibantu untuk *mampu mandiri* dengan *dukungan pemberdayaan* agar bisa *memberi penghargaan* dan *kesempatan* kepada lansia untuk tetap bahagia dan sejahtera dalam lingkungan keluarganya.

Disamping itu lansia yang memerlukan perhatian dan pelayanan keluarga yang memadai, harus didukung oleh keluarga dan masyarakat yang peduli, pemerintah yang tanggap, tenaga pendamping yang trampil, dan dukungan lain yang lebih terpadu. Untuk itu diperlukan upaya untuk menyiapkan dan mendidik tenaga pendamping yang profesional dan mandiri, baik dalam lingkungan keluarga atau lembaga-lembaga yang dikembangkan untuk itu. Penyediaan tenaga seperti ini perlu terus dipacu dan dikembangkan secara wajar agar dicapai keandalan yang memadai.

### ***Lansia Potensial***

Mempersiapkan diri untuk menjadi *lansia yang sejahtera dan tetap peduli terhadap masyarakat sekitarnya* sesungguhnya harus dimulai pada usia yang sangat dini. Masa anak-anak dalam kandungan, semasa usia balita, dan semasa remaja, haruslah menjadi awal dari persiapan untuk menjadi *lansia sejahtera untuk waktu yang relatif lama.* Perhatian terhadap kesehatan janin, anak-anak dan remaja adalah sama pentingnya dengan perhatian terhadap pembekalan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. *Anak-anak harus sehat* karena tubuh mereka diperlukan untuk bertahan menjadi *lansia andalan* yang harus sehat wal'afiat sampai usia yang sangat tinggi. Anak-anak kita harus juga mendapat bekal ilmu pengetahuan dan ketrampilan yang mencukupi karena dalam usia kerja mereka harus mempunyai *pendapatan yang cukup* agar bisa menabung dalam jumlah yang memadai untuk biaya menjadi *lansia sejahtera untuk waktu yang lama.*

Persiapan menabung untuk hari tua itu sangat diperlukan karena generasi muda sekarang harus hidup dalam dunia baru dimasa depan dengan proporsi lansia yang makin membengkak. Adalah tidak adil apabila lansia masa depan yang jumlahnya sangat tinggi harus membebankan kehidupannya yang panjang kepada anak cucu, yang pada waktu yang bersamaan harus berjuang untuk menghidupi keluarga barunya. Dimasa datang *dependency ratio lansia* naik menjadi sangat tinggi. Untuk mengurangi beban keluarga, terutama beban penduduk usia kerja, harus dikembangkan *tiga kebijaksanaan dan langkah-langkah konkrit* sebagai berikut. *Pertama*, bagi lansia yang mampu dan masih kuat mental fisiknya, bisa memperoleh kesempatan untuk tetap bekerja, atau mendapat kesempatan kerja baru sesuai dengan kemampuannya, agar bisa membiayai kehidupannya secara mandiri. *Kedua*, bagi yang fisik dan mentalnya tidak kuat lagi, harus mempunyai dukungan tabungan yang cukup, yang dikembangkan selama masa kerjanya, agar tidak membebani anak cucunya. *Ketiga*, lansia yang tidak mampu harus menjadi tanggungan dari lembaga-lembaga kemasyarakatan yang

bersama-sama dijamin oleh pemerintah dan masyarakat dalam bentuk subsidi silang yang saling meringankan.

Bila dilihat secara prosentase, peningkatan angkatan kerja penduduk lansia lebih tinggi dibandingkan dengan peningkatan angkatan kerja laki-laki sebesar 19,4 persen atau rata-rata 3,8 persen setiap tahun. Sedangkan peningkatan angkatan kerja penduduk lansia perempuan sebesar 26,3 persen atau rata-rata 5,2 persen per tahun. Ini berarti bahwa pelayanan untuk para lansia yang diselenggarakan di Panti-panti menjadi tidak mencukupi.

Agar para lansia dapat menikmati hari tuanya dari uang tabungan, dan tetap peduli terhadap masyarakat sekitarnya, harus didukung dengan semacam asuransi. Untuk itu perlu dikembangkan gerakan menabung dengan gegap gempita. Setiap penduduk pada usia kerja *harus menyetor* sebagian dari pendapatannya pada *tabungan wajib* atau semacam *“social security saving”*, atau *“social insurance”* yang dikelola oleh pemerintah dan masyarakat dengan jaminan yang aman. Setiap penduduk harus mempunyai semacam *“social security number”* yang menjadi tanda pengenal untuk mendapat jaminan pada hari tuanya. Pembayaran iuran social security saving itu dapat dibebankan kepada para pengusaha secara gotong royong sehingga tidak memberatkan setiap penduduk yang sedang bekerja.

Selain itu, agar para lansia yang masih mampu dapat melanjutkan kerja atau mencari kerja baru sesuai dengan kemampuannya, perlu dilakukan persiapan-persiapan yang memadai. Untuk mempersiapkan para lansia tersebut, salah satu *gagasan gemilang* telah muncul dari *Drs. Titus K. Kurniadi*, dari *Organisasi Lansia Wulan (Warga Usia Lanjut)*. Gagasan yang diusulkan itu adalah bahwa semua warga menjelang usia lanjut dianjurkan mempersiapkan diri dengan baik, secara sadar dan sungguh-sungguh, agar tetap bisa bekerja pada usia lanjut sesuai dengan kemampuannya. Beliau mengusulkan adanya *“Universitas Usia Ketiga”*. Ada baiknya “Universitas” ini diikuti oleh setiap penduduk, khususnya mereka yang bekerja pada *“pekerjaan formal”* mulai usia *45-50 tahun, yaitu pada saat yang bersangkutan masih aktif bekerja*. Para calon lansia bisa berlatih mempersiapkan kegiatan baru yang mungkin dapat dilakukan dengan dukungan fisik dan mental yang lebih ringan dalam masa lansia yang bisa panjang. Mereka mempersiapkan diri untuk, kalau perlu, berubah profesi dengan menggeluti sesuatu yang baru dan cocok dengan kondisi fisik maupun kemampuannya pada usia lanjut tersebut. Mereka bahkan dapat *meraih karier baru* yang lebih gemilang dalam kehidupan yang baru itu.

### ***Belajar, Bekerja dan Mandiri***

Sementara itu, sejak tanggal *2 Mei 2002* lalu pemerintah telah mencanangkan Gerakan Nasional Peningkatan Mutu Pendidikan di seluruh Indonesia. Sebelumnya sejak bulan *Januari 2002 Yayasan Damandiri* terlebih dulu menggelar *gerakan Peningkatan Mutu Pendidikan* dengan judul yang sama sekaligus disertai ajakan

untuk *Belajar Mandiri* sebagai upaya mengembangkan budaya baru *“Belajar, Bekerja dan Membangun secara Mandiri”*

Bersamaan dengan upaya Belajar Mandiri yang merupakan *“gerakan Damandiri peduli”* itu, dan dilaksanakan bersama dengan *Yayasan Indonesia Damai Sejahtera (Indra)*, mulai tahun ini Departemen Pendidikan Nasional mencanangkan pula *pendekatan pendidikan yang berorientasi bekerja* dan disebut sebagai pendekatan *“Broad-Based Education”* dengan dukungan *“School-Based Management”* yang mengharuskan setiap sekolah menata sendiri urusan rumah tangganya, lengkap dengan pengaturan kurikulum, basis-basis pendidikan kejuruan yang diambil anak-anak didik yang diasuhnya dan upaya meningkatkan mutu pendidikan dan pengajaran di sekolahnya.

Tantangan itu bisa merupakan salah satu *“kesempatan usaha”* yang dapat dilakukan oleh para lansia, terutama *“setelah mengikuti ‘kuliah’ pada universitas usia ketiga”*. Para lansia, terutama yang tempat kediamannya berdekatan dengan sekolah-sekolah, atau universitas, dapat menggalang kerjasama dengan lembaga pendidikan di dekat tempat tinggalnya dengan menjadikan sekolah dan tempat sekitarnya sebagai pusat-pusat pengembangan dan pembangunan baru. Caranya adalah dengan menciptakan dan melaksanakan kegiatan usaha produktif baru yang sekaligus dikaitkan dengan menjadikan tempat usaha itu sebagai lahan untuk praktek para siswa atau mahasiswa. Dalam lahan itu para lansia bisa ikut serta menjadi penghantar mulia, yaitu *“guru untuk kegiatan pendidikan yang berorientasi BBE”* tersebut.

Keikutsertaan pada Universitas Usia Ketiga dapat sekaligus merupakan persiapan untuk menggeluti profesi baru yang sangat mulia itu. Kemampuan daya yang dimiliki dapat merupakan aset, yang mungkin saja sekarang masih mati, tetapi dapat dihidupkan untuk dikembangkan menjadi suatu kekuatan baru membangun tempat-tempat baru yang strategis di sekitar sekolah atau universitas di sekitar kampung halamannya, atau di pedesaan yang tanpa kegiatan itu akan langka pembangunan.

Secara operasional, para lansia dapat bersama-sama dan bekerja sama dengan para guru, saling tolong menolong membimbing para siswa yang bersekolah di rumahnya, di perusahaannya, atau di bengkelnya, menjadi *tenaga pengajar baru* yang melengkapi dirinya dengan *pengetahuan kewirausahaan* yang lebih lengkap, dan dapat dipraktekkan di bengkel atau tempat usaha di rumahnya. Dengan cara demikian, setiap sekolah tidak harus susah-susah membangun prasarana BBE-nya sendiri-sendiri, tetapi para lansia dapat menjadi potensi kependidikan yang luar biasa dahsyatnya. Semoga mendapat perhatian dan berhasil. (*Prof. Dr. Haryono Suyono, Pengamat Masalah Sosial Kemasyarakatan*) – *Lansia-1852002*

## MEMPERSIAPKAN KARIER KEDUA

Tanggal 29 Mei yang selalu diperingati sebagai Hari Lanjut Usia (Lansia) merupakan suatu kebahagiaan tersendiri karena di tahun 2002 ini, para lansia Indonesia minimal sudah mempunyai UU tentang Kesejahteraan Lansia. Dengan UU yang telah berumur empat tahun itu kita berharap segera diciptakan langkah-langkah konkrit oleh pemerintah untuk membangun suasana yang kondusif agar para lansia yang masih mampu bisa tetap memberikan kontribusinya dan mereka yang kurang mampu mendapat bantuan yang diperlukannya.

Memang suasana sekarang serba salah. Dengan adanya krisis keuangan sekitar tahun 1997, yang berlanjut menjadi krisis ekonomi berkepanjangan, dapat diperkirakan bahwa jumlah penduduk miskin meningkat. Dengan sendirinya keluarga lansia yang menderita juga pasti meningkat. Bahkan kalau penduduk lansia miskin asli tidak bertambah, pasti ada tambahan penduduk miskin yang mungkin bukan berasal dari keluarga yang sebelumnya sudah miskin, tetapi adalah dari keluarga-keluarga yang semula justru tidak miskin. Bagi lansia yang kehilangan pekerjaan karena pensiun atau karena tidak mampu lagi bekerja kasar dengan ototnya, kemiskinan baru itu sudah lebih pasti.

Keadaan lansia seperti ini tidak banyak kita pikirkan di masa lalu karena jumlah mereka yang tua atau lansia tidak seberapa. Tetapi dengan makin baiknya tingkat kesehatan dan keberhasilan KB yang menonjol, jumlah lansia membengkak dengan sangat cepat. Jumlah lansia yang kehilangan pekerjaan formalnya menjadi makin besar dan mereka yang tidak ingin bekerja dengan otot juga makin tinggi.

Disamping itu pekerjaan pertanian makin juga menyusut dan dianggap makin tidak mencukupi tuntutan lapangan kerja masyarakat yang ada di pedesaan. Para ibu yang biasanya banyak bekerja dirumah karena jumlah anak yang banyak, atau membantu suaminya di sawah, juga makin kekurangan pekerjaan karena anak-anak bersekolah dan tidak memerlukan penanganan yang terlampau rumit. Karena berbagai alasan pertanian itu belum berubah menjadi industri. Proses industrialisasi yang bersifat mikro tidak segera tumbuh di daerah pedesaan, sehingga suasana perkampungan, terutama di musim kering, atau saat-saat penduduk tidak mengolah sawah, suasana menjadi bertambah "*sepi*" dan lenggang.

Dalam keadaan seperti itu Yayasan Damandiri mengembangkan suatu gagasan yang secara pelahan telah dilaksanakan di beberapa daerah dengan baik melalui berbagai mitra kerja Yayasan di lapangan. Salah satu pengalaman yang menarik adalah usaha yang dilakukan oleh *Ibu Sri Budarningsih* dari Desa Mantingan di Jepara. Ibu yang sekarang masih sangat aktif sebagai Kepala Sekolah Taman Kanak-kanak ini adalah seorang ibu yang sangat menaruh perhatian terhadap masyarakat sekitarnya, sekaligus mampu mengembangkan karier keduanya sebelum memasuki usia pensiun dan suaminya pensiun terlebih dulu.

Sejak dua tahun terakhir ini, Ibu Sri Budarningsih mempersiapkan rumahnya menjadi lahan industri mengikuti gerak masyarakat sekitarnya dalam bidang meubelair, ukir atau pembuatan akhir dari meubelair yang memang terkenal di wilayah Jepara.

Karena suaminya seorang pegawai dan Ibu sendiri adalah seorang pegawai, maka dihimpunlah ibu-ibu petani di sekitarnya untuk bersama-sama belajar mengampelas kursi meja dan segala macam pekerjaan perkayuan. Dipilihnya pemasok dari beberapa wilayah yang sanggup mengirim bahan mebel bermutu setengah jadi yang memerlukan pekerjaan penghalusan yang rapih dan berkualitas.

Sebagai guru taman kanak-kanak, Ibu Sri dengan telaten mengundang tukang yang ahli untuk memberi pelajaran kepada Ibu-ibu yang diajaknya bergabung dalam usaha rumah tangga yang mulai ditekuninya itu. Untuk modal awal Ibu Sri Budarningsih meminjam dana dari **Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Nusamba** yang didukung oleh **Yayasan Damandiri**. Dana awal itu dipergunakannya untuk modal membeli peralatan sederhana dan bahan-bahan untuk ampelas, pelitur dan segala sesuatu yang diperlukan untuk pekerjaan penghalusan meubelair itu.

Dengan pilihan bahan mebel setengah jadi yang sangat berkualitas dan dengan kesabaran para ibu-ibu yang semula isteri para petani di sekitar rumahnya itu, para pekerja menggarap **'finishing' meubelair** di tempat usahanya dengan kecermatan yang sangat tinggi. Bisa diduga hasilnya sungguh sangat menakjubkan. Karyanya di senangi oleh para pedagang yang ada di daerah Jepara pada umumnya.

Dengan modal tambahan dari BPR Nusamba Ibu Sri Budarningsih kemudian membuka **'show room'** sendiri dirumahnya. Anaknya yang sudah selesai kuliah di **Institute Seni Indonesia (ISI)** yang semula bekerja di tempat lain ditariknya untuk membantu usahanya yang bertambah maju, sementara dia sendiri tetap bekerja sebagai Kepala Taman Kanak-kanak. Secara teratur dia menggeluti usahanya setelah jam kerja atau pada hari Sabtu dan Minggu.

Dengan sentuhan berkualitas dari anaknya yang berbakat seni, produknya makin menunjukkan kekhususan dan kualitas yang menonjol. Beruntunglah keluarga Ibu Purninati karena produknya ketahuan pembeli dari luar negeri, khususnya dari Malaysia dan Brunei Darusalam yang kemudian tertarik dengan sentuhan seni dan tangan halus para ibu yang mengerjakan karya-karya yang bermutu tersebut.

Dengan masukan tambahan berupa sentuhan khas Malaysia dan Brunei serta keaslian ukiran Jepara, produk dari Ibu Sri Budarningsih sekarang menjadi dambaan masyarakat Malaysia dan Brunei dan dia secara teratur menjadi pemasok dari toko-toko mebel yang ada di negara jiran itu.

Komitmen dan dukungan dari Ibu Sri Budarningsih, yang calon lansia, dengan usahanya yang tekun ternyata membawa hasil yang sangat bermakna. Ibu Sri Budarningsih akan

memasuki masa pensiun dengan karier baru sebagai ***‘juragan’*** atau pemimpin pabrik ***‘finsihing’*** dari mebel-mebel antik yang mempunyai pasaran internasional. (*Prof. Dr. Haryono Suyono, Pengamat Sosial Kemasyarakatan*)-Pengantar-Persiapan Lansia-2752002.

## KAMPUS DAN OTONOMI DAERAH

Dalam semangat membangun secara mandiri, otonomi daerah yang mulai marak, dan upaya beberapa kampus untuk mulai mengembangkan diri menjadi lembaga pendidikan yang otonom, perlu dikembangkan strategi praktis yang mudah dilaksanakan. Proses pengembangan itu tidak mudah. Umumnya orang berpikir muluk-muluk dan ingin segera mendapatkan uang yang banyak. Kita harus realistis. Kita harus tidak malu menyusun strategi dan mengambil langkah-langkah nyata yang sederhana. Kita harus bisa mengembangkan pendekatan ekonomis tanpa mengorbankan kualitas akademis. Kita harus tetap memberi kesempatan anak-anak berbakat dari keluarga kurang mampu untuk bisa mengikuti pendidikan tinggi dengan kualitas prima.

Berbagai universitas harus sanggup makin dekat dengan rakyat dan pemerintah daerahnya. Kampus harus berpikir besar tetapi tidak malu mengambil langkah sederhana tetapi strategis untuk lebih aktif mengembangkan daerahnya. Pengembangan daerah ini pada saatnya akan menghasilkan kekuatan *“snow ball”* yang maha besar dan tidak ada seorangpun yang sanggup menghentikannya. Apabila kekuatan itu sudah datang, pasti akan mampu menopang kehidupan kampus yang mandiri.

Berbagai universitas yang selama ini telah memberi kesempatan pada mahasiswa potensial dari keluarga kurang mampu, harus makin gencar menarik simpati berbagai pihak yang sejalan. Universitas seperti itu harus membuka kesempatan yang bisa menarik minat para investor sepanjang tahun untuk terjun ke kampus mencari dan atau mendidik kader untuk perusahaannya. Kalau perlu para investor itu diberi kesempatan *“mengambil mahasiswa potensial yang hampir jadi”* setiap waktu dengan penggantian beasiswa dan imbalan sumbangan untuk kampus yang memadai. Dengan cara demikian, kampus harus secara proaktif mencari dan mengajak investor untuk membantu mendidik tenaga potensial yang segera bisa membantu pengembangan dunia usaha dalam kerjasama yang saling menguntungkan.

Pemerintah daerah, serta seluruh aparatnya, dan keluarga-keluarga yang berada di sekitar kampus bisa diajak ikut serta mengembangkan kehidupan kampus yang nyaman dan penuh kreativitas. Wilayah sekitar kampus, bahkan wilayah kota dimana universitas itu berada harus menjadi suatu wilayah yang *“gila kampus”*. Ada upaya menjadikan kampus sebagai *pusat pengembangan ekonomi perkotaan* atau *pusat pengembangan ekonomi daerah*.

Untuk itu para dosen dan mahasiswa harus makin peduli terhadap kehidupan pemerintahan daerah dan terhadap kehidupan masyarakat setempat. Di pusat-pusat kota dirangsang pengembangan *suasana cinta kampus* seperti adanya *toko khusus* atau bagian-bagian toko yang menyediakan tanda mata yang berbau kampus, toko-toko yang dikelola atau dimiripkan suasana kampus, restoran dengan suasana dan tarip kampus, bukan untuk mahasiswa saja, tetapi juga dibuka untuk pembeli biasa yang mungkin *kepingin* mempunyai *“cita rasa kampus”* atau kepingin ketemu dosen dan mahasiswa.

Di kecamatan-kecamatan dipilih desa atau dukuh yang *diberi label serta dibina oleh kampus*. Para dosen dan mahasiswa pada hari-hari tertentu berkunjung ke SD, SLTP, atau SMU setempat untuk berbincang-bincang dengan para siswanya. Bisa juga para dosen dan mahasiswa berkunjung ke desa untuk bertemu dengan rakyat biasa dan membantu pemberdayaan keluarga miskin yang ada di desa tersebut. Bisa juga para dosen dan mahasiswa mengadakan kegiatan olah raga atau kegiatan apapun yang mempunyai sifat bisa mendekatkan diri dengan masyarakat desa setempat.

Kedekatan dan kepedulian seperti ini harus makin menjadikan suatu kota dimana kampus itu berada makin menyatu dan makin mempunyai *visi bersama* atau *shared vision* untuk hidup makin mandiri. Gagasan otonomi dan upaya menyatu dengan masyarakat itu bisa disegarkan dengan memberi warna baru kepada kegiatan *Kuliah Kerja Nyata* atau *Kuliah Kerja Usaha*. Kegiatan yang pernah sangat populer itu harus diberi daya tarik baru. Hal-hal yang baik bisa makin dikembangkan dan hal-hal yang kurang berguna dihilangkan. Para mahasiswa harus bebas memilih masyarakat dimana mereka akan menyatu dan menyatakan kepeduliannya dengan program nyata. Para dosen dapat melakukan pembinaan seperti halnya dalam kuliah-kuliah dimuka kelas. Mereka bisa memberikan banyak contoh lapangan, memberi bekal tentang adanya kendala yang bisa atau harus dihadapi mahasiswa dalam program menyatu dengan masyarakat.

Masyarakat sendiri dapat mengembangkan prakarsa untuk *“menjemput bola”* dengan mengundang partisipasi dosen dan mahasiswa yang dipilih untuk ikut serta dalam kegiatan pembangunan di kampungnya. Proses demokrasi dalam arti langkah nyata dapat mulai dipraktekkan bukan untuk saling caci maki, tetapi untuk bersama-sama mengembangkan partisipasi dalam pembangunan menurut pilihan yang bebas.

Dengan cara demikian setiap universitas akan mendapat pengayaan dan para mahasiswa akan menimba pengalaman lapangan jauh sebelum yang bersangkutan lulus. Masyarakat sendiri akan mendapat manfaat dari berbagai masukan ilmiah yang disumbangkan para dosen dan mahasiswa dengan ongkos yang relatif sangat minimal.

Apabila usaha ini berhasil, tidak mustahil kehidupan masyarakat kota atau kabupaten dalam pengembangan kehidupan yang makin mandiri dapat dilakukan secara sinergi. Masing-masing pihak akan mendapat keuntungan yang memuaskan. Masyarakat yang makin maju hampir pasti akan menjadi incaran para investor. Sebaliknya universitas yang makin mengenal masyarakatnya akan makin dicintai oleh para mahasiswa dan menjadi incaran calon-calon mahasiswa dari berbagai sekolah yang ada.

Mudah-mudahan pikiran-pikiran sederhana ini bisa merangsang pengembangan strategi yang menyentuh hati nurani rakyat. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk menggalang kebersamaan dan kepedulian yang mengantar lembaga pendidikan tinggi makin mandiri dan dicintai rakyat. (*Prof. Dr. Haryono Suyono, Pengamat Masalah Sosial Kemasyarakatan*). – *Pengantar-Kampus-1092001*.